

LKJIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)



**DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar ini dibuat dengan tujuan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat kota Makassar berkembang secara mandiri setara dengan tingkat kehidupan kota Makassar. Selain itu laporan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, program / kegiatan dan merupakan perwujudan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar tahun 2021.

Berkenaan dengan itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kota Makassar ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Makassar, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR**

AKHMAD NAMSUM, S.Ag.,MM
NIP : 19670524 200604 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, dan sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pada umumnya dan Dinas Pertanahan Kota Makassar pada khususnya, wajib membuat Laporan Kinerja yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintahan tersebut atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanahan Kota Makassar ini, memuat hal-hal akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja meliputi Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar selama tahun anggaran 2021. Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Persentase asset tanah pemerintah kota yang diamankan;
indikatornya : Persentase asset tanah yang disertifikatkan + Persentase asset yang diamankan melalui pengamanan fisik;
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah tercapai sebesar 32% dari target sebesar 37 %.
- b. Sasaran 2 : Persentase peningkatan kinerja pelayanan;
indikatornya : Rata-rata capaian kegiatan dari program penunjang urusan;
capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah tercapai sebesar 90% dari target sebesar 90 %.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penerimaan retribusi sewa tanah barang milik daerah kota Makassar dan tanah *ex.gemeente* dengan capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah tercapai sebesar Rp. 3.326.445.021.56 dari target

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanahan Kota Makassar ke depan, sebagai berikut :

1. Terbatasnya kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pertanahan dalam hal pelaksanaan tugas, dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pertanahan;
2. Terdapat asset tanah pemerintah yang diklaim pihak lain;
3. Terdapat beberapa asset tanah pemerintah kota yang belum lengkap dokumen penguasaan fisiknya sehingga terkadang membutuhkan waktu koordinasi yang cukup lama karena melibatkan beberapa pihak diantaranya pemilik lahan yang berbatasan langsung dengan asset, kelurahan RW/RT setempat dan BPN;
4. Terbatasnya pemahaman Hukum pertanahan;
5. Terbatasnya sarana dan prasarana gedung menyebabkan belum optimalnya pengadministrasian dan penatausahaan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Struktur Organisasi
- 1.2 Tugas dan Fungsi
- 1.3 Isu-isu Strategis
- 1.4 Keadaan Pegawai
- 1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja
- 1.6 Keuangan
- 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi dan Misi
 - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021
 - 2.3.1 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
- 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 - 3.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.2.2 Program Pengelolaan Izin Lokasi
 - 3.2.3 Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan
 - 3.2.4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - 3.2.5 Program Pengelolaan Izin Membuka tanah
 - 3.2.6 Program Penatagunaan Tanah
- 3.3 Realisasi Anggaran
- 3.4. Inovasi

BAB IV PENUTUP**LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Makassar, Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 untuk perencanaan pembangunan baik perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan diharapkan dapat menjalankan fungsi sebagai berikut :

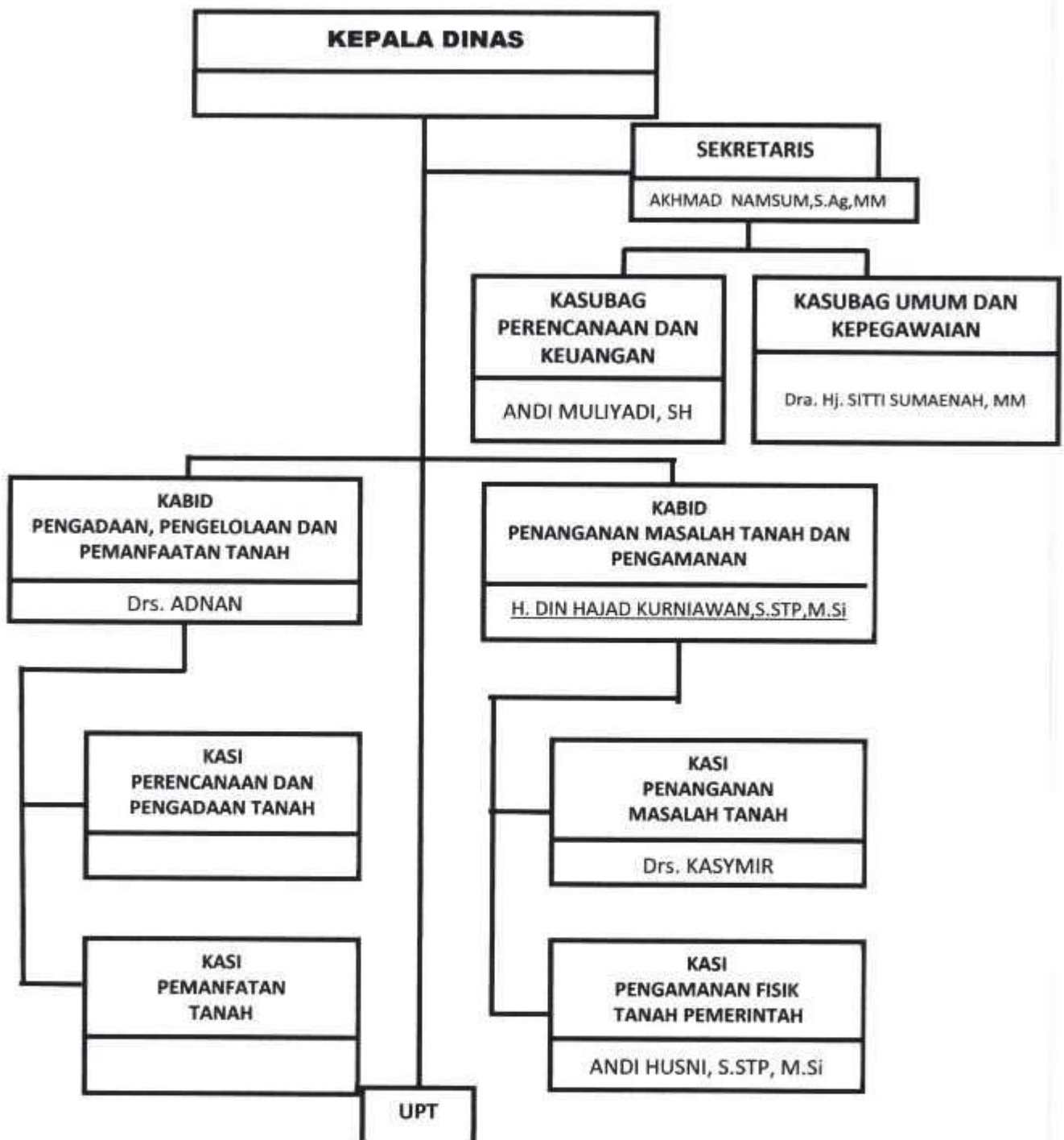
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan. Urusan pemerintah bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pertanahan;
5. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang pertanahan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanahan Kota Makassar berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Makassar Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat terdiri atas :
 1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- C. Bidang Pengadaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Pemanfaatan Tanah;
- D. Bidang Penanganan Masalah Tanah dan Pengamanan
 1. Seksi Penanganan Masalah Tanah;

Gambar 1.1.1
Struktur Organisasi
Dinas Pertanahan Kota Makassar



1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 Nomor 8); Dinas Pertanahan Kota Makassar memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertanahan tahun 2021 adalah :

1. Menyajikan dokumen sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan dan proyeksi anggaran setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pertanahan kota Makassar tahun 2021 yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan.
2. Memberikan panduan dalam pencapaian target kinerja, realisasi dan proyeksi perencanaan pembangunan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar.

1.3. Isu-isu strategis

Dalam mengembang tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Pertanahan Kota Makassar menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan yang dimaksud tersebut dalam menjalankan tugas adalah persoalan Asset Pemerintah Kota Makassar dan Pengadaan Kebutuhan lahan untuk kepentingan Pemerintah. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Terdapat asset tanah pemerintah kota yang diklaim pihak lain mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanan asset tanah pemerintah kota Makassar baik melalui upaya pengamanan administrasi maupun pengamanan secara fisik;
- b. Pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa tanah masih memiliki potensi untuk dikelola dalam rangka meningkatkan penerimaan sewa tanah BMD;

- c. Dinas pertanahan sebagai Dinas type C dengan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN sejumlah 46 orang yang terdistribusi kedalam 2 bidang dan 1 sekretariat, saat ini menjalankan tugas kedinasan dengan kapasitas ruang kantor yang belum memadai;
- d. Berdasarkan nomenklatur urusan dalam pemendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka program pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten kota, sementara pemerintah kota Makassar masih membutuhkan penyediaan/pengadaan lahan untuk kepentingan pemerintah. Mengacu pada peraturan pemerintah No. 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan peraturan menteri agrarian dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional, maka penganggaran dan persiapan pengadaan lahan dilakukan oleh instansi yang membutuhkan dan dinas pertanahan memiliki fungsi supervise terhadap penyusunan dokumen perencanaan dan berpartisipasi aktif sebagai SKPD teknis.

1.4. Keadaan Pegawai

Dinas Pertanahan Kota makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya aparatur sampai dengan tahun 2021 sebanyak 44 Orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.4.1
Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jabatan	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	-	-	-
2.	Sekretaris	Pembina	IV / a	1 Orang
3.	Kepala Bidang	Pembina	IV / a	2 Orang
4.	Kepala Seksi	Pembina TK.1	IV / b	1 Orang
		Pembina	IV / a	1 Orang
5.	Kepala Sub Bagian	Pembina	IV / a	1 Orang
		Penata TK.1	III / d	1 Orang
6.	Pelaksana	Penata Muda	III / a	4 Orang
		Penata Muda TK.1	III / b	4 Orang
		Penata	III / c	1 Orang

Tabel 1.4.2
Berdasarkan Golongan Perjenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Orang
1.	Golongan I	-	-	-
2.	Golongan II	-	-	-
3.	Golongan III	5	5	10
4.	Golongan IV	5	1	6
Jumlah		10	6	16

Tabel 1.4.3
Berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total Orang
1.	SD. SLTP	-	-	-
2.	SLTA	-	1	1
3.	Sarjana Muda / D III	-	-	-
4.	Sarjana (S1)	6	4	10
5.	Magister (S2)	4	1	5
6.	Doktor (S3)	-	-	-
Jumlah		10	6	16

Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan pada Dinas Pertanahan Kota Makassar berjumlah 16 Orang (Enam Belas Orang) dengan Latar Belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum. ASN yang bertugas pada Dinas Pertanahan Kota Makassar didominasi lulusan Sarjana (S1) dan Magister (S2) .

Berdasarkan distribusi pegawai Dinas Pertanahan sebagai berikut :

- a. Sekretariat berjumlah 16 (enam belas) orang;

- c. Bidang Penanganan Masalah Tanah Dan Pengamanan berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Distribusi pegawai ini berdasarkan tingkat beban kerja dan kapasitas ruang yang ada. Adapun pendistribusian 44 orang pegawai baik ASN maupun non ASN pada dua bidang dan sekretariat digambarkan pada diagram berikut :

Gambar 1.4.4
Distribusi Pegawai pada Dinas Pertanahan



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana sebagai pendukung kelancaran tugas Dinas Pertanahan Kota Makassar relatif mencukupi meskipun masih diperlukan penambahan/perbaikan.

Secara garis besar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 1.5.1
Daftar sarana dan prasana yang dimiliki Dinas Pertanahan

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH UNIT	KETERANGAN
1.	Kendaraan Roda Empat	5	Kondisi Baik
2.	Kendaraan Roda Dua	6	5 Kondisi Baik, 1 Kondisi rusak
3.	AC	6	5 Kondisi Baik, 1 Kondisi rusak
4.	Filing Kabinet	3	Kondisi Baik
5.	Kamera	1	Kondisi Baik
6.	Mini Komputer / PC	20	18 Kondisi Baik, 2 Kondisi rusak berat
7.	Kursi	33	Kondisi Baik
8.	Meja	25	23 Kondisi Baik, 2 Kondisi rusak
9.	Mesin Ketik	1	Kondisi rusak
10.	Laptop / Note Book	5	4 Kondisi Baik, 1 tidak diketahui dimana
11.	Printer	17	11 Kondisi Baik, 2 Kondisi rusak, 2 tidak terpakai
12.	Televisi	3	1 Kondisi Baik, 1 Kondisi rusak
13.	Lemari Arsip	10	Kondisi Baik
14.	Handy Talky	3	Kondisi Baik
15.	Proyektor Infokus	1	Kondisi Baik
16.	Scanner	2	Kondisi Baik
17.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi Baik

1.6. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Makassar pada tahun 2021 berasal dari APBD anggaran DPA Pokok sebesar Rp. 35.951.710.000,- (Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 5.306.807.099,- (Lima milyar tiga

3.2.2 Program Pengelolaan Izin Lokasi

Dalam program pengelolaan izin lokasi sub kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dalam Renja Pokok Dinas Pertanahan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha. Sepanjang tahun 2021 belum ada permohonan yang masuk terkait pemberian izin lokasi dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha sehingga target dan anggaran kegiatan ini telah dihapuskan dalam Renja Perubahan, demikian pula dengan anggaran dari program tersebut. Adapun formula perhitungan indikator program pengelolaan izin lokasi sebagai berikut :

Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi :

$$= \frac{\text{Luas tana sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Luas seluruh tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 \text{ permohonan}}{0 \text{ terbit}} \times 100\% = 0$$

3.2.3 Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan

Pada program penyelesaian sengketa tanah Garapan dilaksanakan kegiatan mediasi sengketa tanah dengan indikator kinerja program adalah Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi, dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah sengketa yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Dinas Pertanahan telah melaksanakan 12 mediasi terhadap 12 permohonan mediasi yang masuk. Sehingga capaian program adalah 100 %

$$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi anggaran program penyelesaian sengketa tanah garapan adalah Rp. 162.909.844,- dari pagu anggaran senilai Rp. 184.841.400,- atau sebesar

Tabel. 3
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Indikator Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja
Perangkat Daerah)

Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	<i>Persen</i>	100%	100%	99%
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	dokumen	9	9	100
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan	40	39	98
Kegiatan: Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlaksana	laporan	3	3	100
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun	laporan	9	9	100
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	bulan	12	12	100
Rata-rata (%)					99

Tabel. 4
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas)

Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	<i>Persen</i>	90%	62%	62%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	5	1	25%

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan misi Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Pengukuran tingkat Capaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar tahun 2021 dengan realisasi pencapaiannya. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut :

3.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk memperoleh outcome persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik, maka dilaksanakan beberapa kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam tabel 2 berikut :

Tabel. 2
Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(Indikator persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik)

Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	<i>Persen</i>	90	90	90
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis	1	1	100
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang terlaksana	unit	17	17	100
Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah administrasi umum Perangkat daerah yang terlaksana	jenis	22	22	100

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Ringkasan Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanahan Kota Makassar tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKJIP / manfaat LKJIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Makassar Potensi yang menjadi Sistematika penulisan LKJIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Setiap unit organisasi perlu membuat perencanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan manajemen sekaligus untuk melaksanakan seluruh aktivitas organisasi. Dengan adanya perencanaan yang jelas maka suatu organisasi akan dapat mengelola potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Rencana Kinerja minimal menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan indikator kinerja yang diperlukan untuk operasionalisasi kinerja organisasi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pejabat dan pegawai.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut Dinas Pertanahan Kota Makassar menyusun Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada akhir tahun 2021.

Perjanjian kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

2.1.1. Visi dan Misi

diformulasikannya tujuan, maka Dinas Pertanahan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam mencapai misinya.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pertanahan Kota Makassar harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan visi-misi Walikota terpilih. Kualitas rencana pembangunan tersebut dapat dilihat dari adanya tujuan, target, dan sasaran yang terukur serta integrasi dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berdasarkan dari Visi-Misi Walikota Makassar yang di implementasikan dalam perwujudan visi-misi Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 1
Visi-Misi Dinas Pertanahan 2021

Visi	Misi	Sasaran Daerah
Terciptanya Sistem Administrasi Petanahan Aset Kota Makassar yang Aman dan Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata, Memanfaatkan dan Mengamankan Asset Pemerintah Kota Makassar; 2. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Aparatur menjadi aparatur yang handal dan professional; 3. Penggunaan aplikasi teknologi untuk pelayanan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pelayanan Dasar yang Berorientasi Global; 2. Terwujudnya Sistem Pendataan Tanah Aset Kota Makassar; 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Profesional Dalam Menangani Permasalahan Pertanahan; 4. Terwujudnya Pendataan Aset Pemerintah Kota Makassar Yang Berupa Tanah; 5. Terwujudnya Monitoring dan Evaluasi yang Memantau Aset Pemerintah Kota Makassar Berupa Aset Tanah.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Maksud penyusunan LKJIP Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah untuk mewujudkan komitmen, konsistensi perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi Dinas Pertanahan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan dioperasionalkan secara konsekuensi berdasarkan prinsip-prinsip prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Tujuan Rencana kerja Dinas Pertanahan Dinas Pertanahan Tahun 2021 adalah :

1. Memberi arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan administrasi umum;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan optimalisasi pengelolaan keuangan;
4. Mendorong intensifikasi sewa tanah Barang Milik Daerah Kota Makassar dan penatagunaan Tanah Exgementee.

Penyusunan LKJIP Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 dimaksudkan untuk mengukur pencapaian kinerja program dan kegiatan hingga akhir tahun perencanaan Triwulan keempat tahun 2021.

Sasaran Strategi

Sasaran Strategi adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian (outcome) program perangkat daerah.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2021 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang memadai sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi umum;
3. Meningkatnya kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi keuangan;

2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program utama dan Program pendukung berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 yang direncanakan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Strategi, Program dan Kegiatan Kantor
Dinas Pertanahan Kota Makassar

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	2	3	4
1.	Tersedianya dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi yang memadai sebagai acuan pelaksanaan pembangunan;	Program Pengelolaan izin lokasi;	akan dilaksanakan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha;
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi umum;	Program Penyelesaian Sengketa tanah Garapan;	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten kota dengan cara Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dam satu daerah kabupaten / kota;
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk pelayanan administrasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan;	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota

			dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar;
4.	Terjaminnya keamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Makassar;	Program Pengelolaan Izin Membuka tanah;	Penerbitan izin membuka tanah dengan cara pengendalian dan pemanfaatan tanah negara, akan dilaksanakan pemasangan patok batas tanah pemerintah Kota, pemagaran tanah aset Pemerintah Kota, pemasangan papan bicara diatas tanah aset Pemerintah Kota Makassar;
5.	Penerimaan retribusi sewa tanah barang milik daerah Kota Makassar dan tanah exgementee.	Program Penatagunaan Tanah	Pengunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kota : <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah - Pemetaan zona nilai tanah kewenangan Kota Makassar dimana kegiatan pensertifikatan tanah aset pemerintah Kota akan dilaksanakan .

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terjaminnya Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah tersertifikat; - Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah diamankan secara fisik dilapangan; 	P E R S E N	75%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Makassar.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pembebasan tanah yang telah diselesaikan. 		100%
3	Terwujudnya Akurasi Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan tanah penda yang telah di tata usahakan; - Persentase database 		50%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	4.458.538.000,-	A P B D
2	Program pengelolaan izin lokasi	11.275.000,-	
3	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	183.041.400,-	
4	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	30.096.748.200,-	
5	Program pengelolaan izin membuka tanah	625.529.000,-	
6	Program penatagunaan tanah	584.868.400,-	

Pada tahun 2021 Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar dikarenakan adanya Pandemi Covid 19.

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terjaminnya Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	- Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah tersertifikat; - Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah diamankan secara fisik dilapangan.	P E R S E N	60%
2	Terpenuhinya Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Makassar.	- Persentase pembebasan tanah yang telah diselesaikan.		100%
3	Terwujudnya Akurasi Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	- Cakupan tanah pemda yang telah di tata usahakan; - Persentase		

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	3.559.423.099,-	A P B D
2	Program pengelolaan izin lokasi	0	
3	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	184.841.400,-	
4	Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	84.018.200,-	
5	Program pengelolaan izin membuka tanah	926.926.000,-	
6	Program penatagunaan tanah	5,-	

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar melaksanakan kegiatan dengan DPA Pokok sebesar Rp. 35.951.710.000,- (Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 5.306.807.099,- (Lima milyar tiga ratus enam juta delapan ratus tujuh ribu Sembilan puluh Sembilan rupiah).

2.3.1. Alokasi Anggaran Persasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Anggaran Belanja Langsung Persasaran Strategis

No.	Sasaran	Anggaran	Presentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Terjaminnya Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	- Pagu : Rp. 926.926.000,- + Rp. 551.598.400,- - Terealisasi : Rp. 923.592.729,- + Rp. 539.316.584,-	98 %	APBD PERUBAHAN
2	Terpenuhinya Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Makassar.	- Pagu : Rp. 84.018.200,- - Terealisasi : Rp. 71.115.000,-	85 %	
3	Terwujudnya Akurasi Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar.	- Pagu : Rp. 184.841.400,- + Rp. 3.559.423.009,- - Terealisasi : Rp. 3.343.347.313,- +	92 %	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2021

Hasil pencapaian kinerja diukur dengan mengacu pada hasil capaian indikator kinerja setiap kegiatan yang terdiri dari input, output, dan outcome. Indikator kinerja beserta target masing-masing sasaran dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahunan dimaksudkan sebagai sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang direalisasikan Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam rangka pencapaian kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam laporan ini berbasis pada penilaian sendiri (self assessment) dengan menggunakan kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d <85	Berhasil
3.	55 s/d <70	Cukup Berhasil
4.	0 s/d <55	Tidak Berhasil

Indikator kinerja merupakan media untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam pencapaian kinerja, terdiri atas masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan telah tercapai atau sebaliknya.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.4 Sasaran Penyelesaian Konflik Sosial di Masyarakat Meningkat

Adapun Data Penyelesaian Sengketa tanah yang telah dimediasi di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 1
Sasaran Penyelesaian Konflik di Masyarakat

No.	Tanggal	Masalah	Yang menangani	Rekomendasi	Kelurahan / kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	10 maret 2021	Permohonan mengenai sertifikat tanah Lapangan Antang	Kasi penanganan masalah tanah	Hj. Ira Andriana Adnan	Kel. Antang, Kec. Manggala	Dalam Proses Pengadilan
2.	29 maret 2021	Permohonan Fasilitas percepatan penerbitan sertifikat pembangunan rumah tinggal layak huni	Kepala Dinas Pertanahan	ADM Kordinator Kota 1 Makassar	Kel. Bira Kec. Biringkanaya	proses telah selesai penyerahan sertifikat
3.	14 April 2021	Permintaan Klarifikasi terkait pemasangan papan bicara diatas aset tanah TNI-AD	Kepala Dinas Pertanahan	Kodam XIV Hasanuddin	Kel. Mamajang luar Kec. Mamajang	Selesai dalam bentuk penyampaian surat klarifikasi
4.	14 April 2021	Permohonan Ganti Rugi Tanah	Kepala Dinas Pertanahan	Takbir Salam, SH	Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo	Dalam proses mediasi
5.	27 Mei 2021	Permohonan penyerahan PSU dilokasi Bumi Tamalanrea Permai (BTP)	Kepala Dinas Pertanahan	Perumnas	Kel. Buntusu, Kec. Tamalanrea	Dalam proses pembuatan surat keterangan pernyataan
6.	04 Juni 2021	Tindak Lanjut Pengembalian Batas Terminal Regional Daya	Kepala Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan	Kel. Daya Kec. Biringkanaya	Dalam proses di BPN untuk pengembalian batas
7.	13 Sept 2021	Objek Tanah Milik Ahli Waris Hj. Sarimba Dg. Sanga PR berdasarkan hak milik persil 44 DII kohir 547 CI	Kepala Dinas Pertanahan	Andi Marlina	Jalan Mamuju Raya-Sudiang Raya Kel. Laikang Kec. Biringkanaya	
8.	08 Sept 2021	Membicarakan Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar	Kepala Dinas Pertanahan	Ahli Waris Sabir L Ondoh	Kel. Gunung Sari Kec. Rappocini	Akan dikoordinasikan dengan pihak PT. Asindo dan Notaris SITSKE

10.	13 Oktober 2021	Membahas Kelanjutan rapat pada Rabu 6 Oktober 2021 terkait objek jalan Hj. Ramlah	Kepala Dinas Pertanahan	Tim Pemburuh Asset	Kel. Pattunuang Kec. Wajo	Meminta kepada Satpol PP menelusuri pemalsuan dokumen
						Meminta kepada Dinas Tata Ruang, Camat Wajo dan Lurah
						Pattunuang untuk mengecek regulasi terkait pendirian bangunan
11.	25 Nov 2021	Koordinasi Tim Pengamanan dan penertiban bangunan ruko Bandung Gorden yang berdiri diatas lahan fasilitas jalan umum Barang Milikm Daerah di Jln. KH Agus Salim dan KH. Ramlah	Kepala Dinas Pertanahan	Tim Pemburuh Asset	Kel. Pattunuang Kec. Wajo	Surat Teguran I, berlanjut pada teguran II dan Teguran III hingga pengosongan dan pembongkaran tempat pada 15 Desember 2021
12.	26 Nov 2021	Membahas peralihan lahan eks UPTD Pannampu Kecamatan Tallo	Kepala Dinas Pertanahan	UPTD Pannampu	Kel. Pannampu Kec. Tallo	Akan dilaksanakan rapat lanjutan
13.	03 Des 2021	Membicarakan surat dari warga masyarakat di Jln. Manuruki Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Tgl 25 Oktober untuk membuka 2 portal yang terpasang di pintu masuk jalur utama dan jalur belakang Komplek Perumahan di Jln. Manuruki vna diduaa	Kepala Dinas Pertanahan	warga masyarakat di Jln. Manuruki Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanay a	Kelurahan Sudiang Raya Kec. Biringkanaya	Dalam proses pengecekan berkas

3.2.4 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dengan sub kegiatan adalah : Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota. Realisasi kinerja output tahun 2021 adalah 100 % dengan telah dilaksanakannya Penetapan Lokasi Pembangunan Makassar New Port dan pelaksanaan Sosialisasi Standar Baku Alas hak pertanahan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 180 orang. Realisasi anggaran adalah Rp. 71.115.000 atau 85 % dari pagu anggaran Rp. 84.018.200,-.

Untuk menghitung realisasi indikator outcome yaitu Persentase koordinasi penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah yang terlaksana, dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terlaksana}}{\text{Jumlah dokumen ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang masuk}} \times 100\%$$

Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kota tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan lahan. Untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota Makassar akan ketersediaan tanah untuk pembangunan maka penganggaran pembelian lahan di anggarkan pada SKPD yang akan menggunakan lahan.

Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam proses pembelian lahan bersama dengan SKPD yang membutuhkan lahan ikut terlibat dan mensupervisi proses penyusunan dokumen perencanaan pengadaan lahan. Untuk pengadaan lahan diatas 5 Ha yang melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil, maka Dinas Pertanahan terlibat dalam kepanitian Tim Persiapan Pengadaan. Tim persiapan adalah tim yang dibentuk oleh gubernur / bupati / walikota untuk membantu gubernur / bupati / walikota dalam

Untuk tahun 2021 supervisi yang dilaksanakan Dinas Pertanahan terhadap pengadaan lahan adalah :

- Penetapan Lokasi Makassar New Port dimana proses penetapan lokasi telah selesai dilaksanakan.
- Pengadaan langsung tanah untuk Rumah Potong Hewan (RPH) di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, telah dilaksanakan penandatanganan SK pelepasan tanah.
- Pengadaan langsung tanah untuk Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala, sementara dalam tahap untuk melaksanakan konsultasi publik.

Berdasarkan data diatas maka pada program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan capaian indikator outcome sebesar 67 % dimana 2 telah selesai dari target 3 lokasi. Dihitung dengan cara :

$$= \frac{2 \text{ selesai}}{3 \text{ pengadaan tanah}} \times 100\%$$

$$= 67 \%$$

3.2.5 Program Pengelolaan Izin Membuka tanah

Pada program pengelolaan izin membuka tanah dilaksanakan sub kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara dimana pengamanan fisik terhadap asset tanah pemerintah berupa kegiatan pemasangan patok batas-batas tanah pemerintah Kota, Pemagaran tanah asset Pemerintah Kota, Pemasangan papan bicara atas tanah asset Pemerintah Kota dilaksnakan. Kegiatan ini telah rampung dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan terhadap 8 lokasi asset dari target 8 lokasi atau capaian target 100%. Realisasi anggaran senilai Rp. 923.592.729 atau 99% dari nilai pagu sebesar Rp. 926.926.000

Untuk tahun 2022, dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan pengamanan fisik tanah pemerintah kota, dimana diletakkan pada program penatagunaan tanah. Adapun lokasi pengamanan fisik terhadap asset tanah

Tabel 2
Lokasi Pemasangan Patok TA 2021 pada Asset Tanah Pemerintah

No.	Lokasi	Kelurahan / Kecamatan	Jumlah Patok
1.	Sudiang 2	Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya	14 titik
2.	Bumi Permata Sudiang (BPS)	Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya	33 titik
3.	Bumi Permata Sudiang 4	Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya	4 titik
4.	Perumahan Griya Prima Tonasa	Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya	5 titik

Selain pematokan, kegiatan pemasangan papan bicara juga telah dilaksanakan pada semester I tahun 2021 dan pekerjaan telah rampung 100 % dengan terpasangnya papan bicara pada empat lokasi asset tanah pemerintah Kota Makassar, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3
Lokasi Pemasangan Papan Bicara TA 2021 pada Asset Tanah Pemerintah

No.	Lokasi	Kelurahan / Kecamatan	Jumlah Papan Bicara
1.	Fasum di Perumahan Nusa Harapan Indah	Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya	1
2.	Fasum di Griya Minasa Sari	Kel. Minasa Upa Kecamatan Rappocini	1
3.	Fasum di Perum Minasa Upa Blok E	Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini	1
4.	Fasum di Griya Prima Tonasa	Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya	1

Pemagaran tanah asset Pemerintah Kota dimana target Renja adala pada dua lokasi asset telah dilaksanakan di satu lokasi Fasum/Fasos yang beralamat di Perum Minasa Upa Blok E yang telah selesai pada bulan September 2021, dan pada lokasi asset Fasum di Bumi Permata Sudiang yang telah selesai pada November 2021.

Tabel 4
Lokasi Pemagaran TA 2021 pada Asset Tanah Pemerintah

No.	Lokasi	Kelurahan / Kecamatan
-----	--------	-----------------------

3.2.6 Program Penatagunaan Tanah

Dalam program penatagunaan tanah dilaksanakan kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten Kota dengan sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah
Indikator kinerja sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah adalah jumlah pendataan pemanfaatam tanah exgemente yang terlaksana dengan target 12 lokasi dan realisasi kinerja adalah 100 % dengan telah dilaksanakannya pendataan pada 12 lokasi sesuai target.
Indikator kedua adalah jumlah sosialisasi tata cara pelepasan tanah exgemente yang terlaksana dengan target 2 kali dan telah terealisasi 2 kali atau 100%
- Sub Kegiatan Pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten Kota
Pada sub kegiatan ini dilaksanakan pensertifikatan tanah asset pemerintah dengan indikator output sub kegiatan adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan.

Realisasi kinerja output adalah 16 % dengan terbitnya 8 sertifikat dari target 50 bidang. Proses pengukuran telah dilaksanakan pada 15 bidang dan meunggu penerbitan sertifikat sementara peninjauan lokasi yang akan disertifikatkan telah dilakukan pada 19 lokasi asset tanah pemerintah.

Adapun data sertifikat yang telah terbit di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 5
Sertifikat Asset Tanah Pemerintah Kota yang terbit pada tahun 2021

No.	No.Hak Pakai	Letak Tanah		Penggunaan	Luas (M ²)	Ket
		Desa/ Kelurahan	Kecamatan			
1.	20016	Paccerakkang	Biringkanaya	SDN Paccerakkang	2.021	
2.	1	Biring Romang	Manggala	SD Inpres Borong Jambu	3.776	
3.	20026	Bulurokeng	Biringkanaya	Puskesmas Bulurokeng	198	
4.	20006	Untia	Biringkanaya	Pustu Untia	533	
5.	20002	Bunga Eja Beru	Tallo	Puskesmas Kaluku Bodoa	90	
6.	20015	Buakana	Rappocini	Pustu Buakana	138	

Indikator kinerja program adalah Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan dihitung dengan cara :

$$\frac{\text{Jumlah aset tanah yang telah disertifikatkan}}{\text{Jumlah seluruh aset tanah}} \times 100\%$$

Hingga tahun 2021 jumlah asset yang telah bersertifikat adalah 305 bidang, dan jumlah seluruh asset tanah non jalan adalah 923 bidang sehingga capaian program penatagunaan tanah hingga tahun 2021 sebagai berikut :

$$= \frac{305}{923} \times 100\% = 33\%$$

3.3. Realisasi Anggaran

Dinas Pertanahan Kota Makassar pada Tahun 2021 sesuai dengan rencana kerja perubahan sebagaimana yang telah dituangkan Renja Perubahan Dinas Pertanahan dalam DPA Perubahan - SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.306.807.099,-. Realisasi anggaran telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yaitu sebesar Rp. 5.040.281.470 atau dengan persentase 95% dengan rincian realisasi masing-masing program sebagai berikut :

Tabel 6
Realisasi Anggaran

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	5.306.807.099	5.040.281.470	95%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.559.423.099	3.343.347.313	93%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	51.986.000	44.964.000	87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;	14.860.000	11.631.000	78

Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD;	7.158.000	6.525.000	91
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD;	5.310.000	4.685.000	88
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;	4.075.000	4.048.000	99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	5.062.000	5.015.000	99
Administrasi Keuangan	3.001.339.749	2.856.317.336	95
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;	2.569.916.849	2.432.237.516	95
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD;	208.550.000	205.530.000	99
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;	2.590.000	2.553.000	99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;	2.878.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.	217.404.900	215.996.820	99
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	67.680.500	66.970.500	99
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah;	1.735.000	1.713.000	99
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah;	19.091.000	18.905.000	99
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah.	46.854.500	46.352.500	99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.574.800	97.073.800	92
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;	32.800.000	26.195.000	80
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai;	17.496.800	15.926.800	91
Pendidikan dan Pelatihan;	50.778.000	50.452.000	99

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.299.250	62.724.400	80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;	3.200.000	2.050.000	64
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	24.239.250	23.554.000	97
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;	27.660.000	24.265.000	88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan;	7.200.000	2.000.000	28
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	16.000.000	10.865.400	68
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000	41.550.000	76
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	55.000.000	41.550.000	76
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.686.000	16.501.969	60
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat;	13.286.000	11.849.000	89
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	14.400.000	4.652.969	32
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.856.800	157.245.308	92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;	55.536.800	52.027.500	94
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;	112.660.000	101.667.808	90
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.660.000	3.550.000	97
B	Program Pengelolaan Izin Lokasi	-	-	-
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam			

C	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	184.841.400	162.909.844	88
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam satu Daerah / Kota	184.841.400	162.909.844	88
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	184.841.400	162.909.844	88
D	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	84.018.200	71.115.000	85
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	84.018.200	71.115.000	85
	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kota Makassar.	84.018.200	71.115.000	85
E	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	926.926.000	923.592.729	99
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	926.926.000	923.592.729	99
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	926.926.000	923.592.729	99
F	Program Penatagunaan Tanah	551.598.400	539.316.584	98
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten / Kota;	551.598.400	539.316.584	98
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah;	221.467.400	213.746.544	96
	Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	330.131.000	325.570.040	98

3.4. Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat

Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut :

1. Inovasi Website dan Media Sosial Adanya Pandemi Covid 19 pada tahun ini semakin menampakkan akan pentingnya Teknologi Informasi dalam Penyampaian Informasi dan Komunikasi. Adanya larangan pengumpulan orang dan ketentuan jaga jarak antar person menyebabkan penggunaan media sosial dan IT sangat berarti. Kantor Dinas Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perlunya pemanfaatan teknologi Informasi untuk Transformasi Nilai Nilai dan Diseminasi informasi dikarenakan sasaran yang mau dicapai sebagian besar kaum milineal yang sangat mengerti teknologi informasi. Selain lebih kekinian dan bisa mencapai sasaran, juga akan ada penghematan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi transformasi nilai dan diseminasi informasi tidak harus dengan tatap muka langsung seperti metode lama, tapi bisa diakses di website maupun media sosial lainnya;
2. Melaksanakan bimbingan / sosialisasi tata cara pengadaan lahan dan peraturan terkait pengadaan lahan;
3. Berpartisipasi aktif melakukan supervisi terhadap SKPD yang melaksanakan pengadaan lahan.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Evaluasi Rencana kerja Dinas Pertanahan Kota Makassar merupakan pedoman dalam mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di tahun 2021. Evaluasi ini disusun tetap berpedoman dengan segala bentuk laporan evaluasi dan monitoring selama tahun berjalan, laporan ini juga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanahan Kota Makassar berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pada tahun 2021 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Berikut uraian persentase rasio capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Makassar ;

1. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target 90 % dan capaian 90 %;
2. Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% dan capaian 99%;
3. Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan dengan target 90 % dan capaian 62%;
4. Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi dimana pada Renja Perubahan target di nolkan;
5. Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi dengan target 100% dan capaian 100%;
6. Persentase tanah asset pemerintah yang diamankan melalui kegiatan pengamanan fisik dengan target 100 % pada 8 lokasi asset dan capaian 100%;
7. Persentase tanah asset pemerintah yang disertifikatkan dengan target 35 % dan capaian 33%;
8. Persentase koordinasi penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah yang terlaksana dengan target 3 lokasi dan yang selesai 2 lokasi atau 67 %.

RENCANA TINDAK LANJUT

Langkah-langkah kedepan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan Kota Makassar :

1. Penguatan koordinasi antar instansi, institusi dan stakeholder terkait;
2. Perlunya peningkatan kapasitas pegawai pada Dinas Pertanahan Kota Makassar;
3. Perlunya penguatan dan penertiban administrasi Pertanahan terhadap asset tanah Pemerintah Kota.

Demikian Laporan Evaluasi Renja Tahun 2021 Dinas Pertanahan Kota Makassar yang dapat disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, semoga laporan evaluasi yang disusun dalam Laporan ini memebrikan manfaat dan menjadi acuan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Makassar, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR**

AKHMAD NAMSUM, S.Ag.,MM

Pangkat : Pembina

Nip. 19670524 200604 1 004

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERTANAHAN
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 316006
MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
NOMOR : 891.1/606/DISTAN/XII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5)
 3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55)
 4. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN
2022-2026;
- KESATU** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pertanahan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU**, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Pertanahan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun

dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2021-2026;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Tahun 2022-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar,
Pada tanggal, 17 Desember 2021
Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTAMAKASSAR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 891.1/606/DISTAN/XII/2021
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PERTANAHAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANAHAN
 KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

No	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
1.	Mewujudkan Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	Dinas Pertanahan, Dinas Tata Ruang, BPN	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Luas seluruh tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$
2.	Mewujudkan Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase koordinasi penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah yang terlaksana	Dinas Pertanahan, Instansi pengguna lahan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan}}{\text{Jumlah dokumen ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang masuk}} \times 100\%$
3.	Mewujudkan Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Penanganan Sengketa Tanah Garapan Yang Dilakukan Melalui Mediasi	Dinas Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah sengketa yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa}} \times 100\%$
4.	Mewujudkan Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase Aset Tanah Pemerintah Kota Yang Disertifikatkan	Dinas Pertanahan, BPN	$\frac{\text{Jumlah aset tanah yang telah disertifikatkan}}{\text{Jumlah seluruh aset tanah}} \times 100\%$

5.	Mewujudkan Kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan	Persentase Tanah Pemerintah Kota Yang Diamankan melalui pengamanaan fisik	Dinas Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah asset tanah yang telah diamankan melalui pengamanaan fisik}}{\text{Jumlah seluruh asset tanah}} \times 100\%$
----	---	---	------------------	---

**Plt. KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA MAKASSAR**



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian

Tahun	Keur	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK)	Dana Capaian pada Tahun Anggaran	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	Fasilitas	Lokasi	Kategori			
					Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp	Tujuan	Rp							
Monev dan Pengembangan Kelembagaan Dinas Pertanian	1	1	Monev dan Pengembangan Kelembagaan Dinas Pertanian	100%	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	80%	80%		
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
Monev dan Pengembangan Kelembagaan Dinas Pertanian	2	2	Monev dan Pengembangan Kelembagaan Dinas Pertanian	100%	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	400.000.000	80%	80%	80%		
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%
					100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	100%	100%

Tahun	Semester	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Outcome, Program (terukur) dan Kegiatan (terukur)	Dias Capaian pada Tahun Anggaran	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Terdapat Output pada akhir periode layanan PO	Uraian Kerja PO yang paling penting	Jumlah PO
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			
2023	1	01	Mengantar Administrasi Anggaran Paragraf Daerah	Amatya pelaksanaan administrasi anggaran Paragraf Daerah	12 bulan	3.571.644.175	12 bulan	4.208.376.384	12 bulan	4.832.232.073	12 bulan	4.802.378.622	100%	100%
2023	1	02	Penyediaan OIG dan Terapan ASN yang terakumulasi	Asesmen OIG dan Terapan ASN yang terakumulasi	12 bulan	4.889.885.175	12 bulan	3.963.968.594	12 bulan	4.833.968.594	12 bulan	4.207.942.317	100%	100%
2023	1	03	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Asesmen administrasi pelaksanaan tugas ASN yang terakumulasi	12 bulan	129.830.660	12 bulan	106.532.375	12 bulan	143.348.104	12 bulan	162.717.653	100%	100%
2023	1	04	Perbaikan Pelaksanaan dan Paragraf Daerah yang terakumulasi	Asesmen pelaksanaan dan perbaikan anggaran SPDP yang terakumulasi	12 bulan	90.000.000	12 bulan	94.500.000	12 bulan	99.250.000	12 bulan	102.850.000	100%	100%
2023	1	05	Revisi dan Perbaikan Laporan SPDP	Asesmen laporan dan perbaikan anggaran SPDP yang terakumulasi	12 bulan	1.322.000	12 bulan	5.208.100	12 bulan	5.867.200	12 bulan	7.228.000	100%	100%
2023	1	06	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen laporan keuangan ASN tahun yang terakumulasi	12 bulan	1.597.100	12 bulan	2.086.300	12 bulan	2.201.000	12 bulan	3.178.800	100%	100%
2023	1	07	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen laporan keuangan ASN tahun yang terakumulasi yang terakumulasi	12 bulan	202.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	231.798.200	100%	100%
2023	1	08	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen administrasi anggaran ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	870.008.830	12 bulan	940.000.000	12 bulan	995.000.000	12 bulan	1.045.000.000	100%	100%
2023	1	09	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen pelaksanaan anggaran ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	202.510.400	12 bulan	300.000.000	12 bulan	315.000.000	12 bulan	360.000.000	100%	100%
2023	1	10	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen pelaksanaan anggaran ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	337.000.000	12 bulan	340.000.000	12 bulan	354.000.000	12 bulan	360.000.000	100%	100%
2023	1	11	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen administrasi anggaran ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	385.012.800	12 bulan	395.547.200	12 bulan	398.478.211	12 bulan	402.174.202	100%	100%
2023	1	12	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen pelaksanaan anggaran ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1	13	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen anggaran yang terakumulasi ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	147.834.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	157.000.000	12 bulan	174.647.365	100%	100%
2023	1	14	Revisi dan Perbaikan Laporan Keuangan ASN Tahun 2020	Asesmen anggaran yang terakumulasi ASN Daerah yang terakumulasi	12 bulan	137.388.800	12 bulan	138.347.200	12 bulan	138.375.211	12 bulan	139.899.817	100%	100%

Tahun	No	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Sisa Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan (%)	Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan (%)	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
2	10	1	06	Kegiatan Administrasi Pengawasan Persewaan Daerah	9%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12,013,118	100%	100%	Kota Makassar
3	10	1	03	02	Pengelolaan Pemasangan Prinsip Sertifikasi dan Pengawasan	50 %	06 bulan	06 bulan	06 bulan	06 bulan	06 bulan	06 bulan	06 bulan	38.682.000	100%	100%	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	10.204.000	5 tahun	5 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	40.423.609	12 s.d	12 s.d	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	24.898.250	3 s.d	3 s.d	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	943.947.900	47 tahun	47 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	5.000.000	8 tahun	8 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1.000.000	5 tahun	5 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	22.756.000	10 tahun	10 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	11.231.148	8 tahun	8 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	8.022.300	3 tahun	3 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	630.000.000	13 tahun	13 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	16.343.800	1 tahun	1 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	610.000.000	18 tahun	18 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	440.000.000	0	0	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	60.000.000	0	0	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	70.000.000	3 tahun	3 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	3.200.000.000	1 tahun	1 tahun	Kota Makassar
2	10	1	06	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	980.000.000	15 tahun	15 tahun	Kota Makassar

Tahun	Kategori	Mata	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Outcome, Program (jika ada) dan kegiatan (jika ada)	Jumlah Sasaran pada Tahun Perencanaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	Jumlah Sasaran pada akhir periode 5 tahun	Jumlah Sasaran pada akhir periode 5 tahun	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2022	1	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	88.251.000	12 bulan	86.453.000	12 bulan	42.103.000	12 bulan	48.075.000	12 bulan	51.000.000	100%	510
						12 bulan	17.323.000	12 bulan	17.323.000	12 bulan	19.000.000	12 bulan	20.900.000	12 bulan	21.000.000	100%	210
2023	1	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2024	1	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2025	1	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2026	1	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2022	1	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2023	1	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2024	1	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2025	1	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
2026	1	02	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	Kualitas Jasa Pelayanan dan Peningkatan Efisiensi Pelayanan	12 bulan	12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200
						12 bulan	11.200.000	12 bulan	11.200.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	100%	200

Tahun	Momen	Kode	Program & Kegiatan	Desk Capaian pada Tahun Realisasi	Tahun 2022		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	Kerangka Strategis atau Rencana Kerja	Unit Kerja yang bertanggung jawab	Indikator Kinerja Utama (IKU)
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2022	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	24%	153.724.000	3 bulan	172.807.200	5 bulan	330.000.000	3 bulan	330.000.000	35	Kota Makassar	
2023	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	52% (terdiri dari 20% dari target 2022 dan 32% dari target 2023)	1.120.114.000	40%	1.204.229.417	70%	1.330.412.300	70%	1.407.220.421	70%	Kota Makassar	
2024	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	87%	3.395.200.000	30%	3.827.743.805	84%	3.936.300.000	80%	4.100.000.000	80%	Kota Makassar	
2025	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	87%	4.826.000.000	100% (dalam hal ini)	4.888.823.477	100% (dalam hal ini)	5.278.472.000	100% (dalam hal ini)	5.307.726.401	100% (dalam hal ini)	Kota Makassar	
2026	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	12 mil	127.127.000	4 bulan (dalam hal ini)	134.171.218	4 bulan (dalam hal ini)	140.001.000	4 bulan (dalam hal ini)	154.100.754	4	Kota Makassar	
2027	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	3,2%	1.100.100.000	75 minggu	1.302.272.127	75 minggu	1.365.000.000	75 minggu	1.425.000.000	75%	Kota Makassar	
2028	01	01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	27%	3.276.500.000	80 minggu	4.407.717.550	80 minggu	3.200.000.000	80 minggu	4.100.000.000	100%	Kota Makassar	
Jumlah														
Jumlah												14.112.332.325		



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH**
Jabatan : **Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar**

Selanjutnyadisebutpihakpertama.

Nama : **Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO**
Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

Makassar, 01 Maret 2021
Pihak Pertama,


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar	✓ Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah tersertifikat ✓ Presentase tanah Pemerintah Kota Makassar yang telah diamankan secara fisik dilapangan	75%
2.	Terpenuhinya Kebutuhan Tanah Untuk Kepentingan Insfrastruktur, Sarana dan Prasarana Pemerintah Kota Makassar	Persentase pembebasan tanah yang telah diselesaikan	100%
3.	Terwujudnya Akurasi Data Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar	✓ Cakupan tanah pemda yang telah di tatauahakan ✓ Persentase database pertanahan yang berbasis web	50%

Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Izin Lokasi
3. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
6. Program Penatagunaan Tanah

Anggaran

- Rp. 4.458.538.000,-
 Rp. 11.275.000,-
 Rp. 183.041.400,-
 Rp. 30.096.748.200,-
 Rp. 625.529.000,-
 Rp. 584.868.400,-

Walikota Makassar,


 Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO

Makassar, 01 Maret 2021
 Pimpinan Perangkat Daerah


 Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH